KEPENTINGAN INDONESIA MENJALIN KERJASAMA DENGAN MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DALAM KERANGKA KERJA *HEART OF BORNEO* TAHUN 2007-2011

Hendrik Sudarmoko[1] dan Afrizal

hendriksudarmoko@gmail.com

Abstract

This research explains the interests of Indonesia in cooperation Heart of Borneo to the preservation of the Borneo jungle 2007-2011. Indonesian forest has a very broad and important role in climate change negotiations. Indonesia proposed REDD mechanism for reducing forest emissions from deforestation and degradation . bad image of Indonesia's forests create hesitate developed countries to provide financial assistance through CDM or REDD mechanism. The research's result is importance Indonesia the cooperated heart of Borneo is to fix a bad image in the eyes of international forest management. Indonesia is known as the country with the fastest rate of deforestation in the world. cooperation became evident Heart of Borneo Indonesia's commitment in the eyes of the international community. With the Heart of Borneo Indonesia program receive financial assistance from developed countries such as Norway, Germany, Australia and other international agencies.

Key Words : Heart of Borneo, REDD, Economic Interests, Image, World Order Interests.

Pendahuluan

Indonesia memiliki hutan yang cukup luas sehingga memiliki peranan penting dalam menjaga paru-paru dunia sekaligus memperlambat laju pemanasan global. Hutan tropis Indonesia merupakan salah satu hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Luas wilayah Indonesia 187,8 juta hektar dan 70 % atau sekitar 132,4 juta hektar merupakan hutan. Kerusakan hutan atau deforestasi masih menjadi ancaman yang serius bagi Indonesia, deforestasi merupakan penurunan luas hutan baik secara kualitas dan kuantitas. Laju deforestasi antara tahun 1985-1997 mencapai 1,8 juta hektar per tahun,

[1] Alumni Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

sedangkan pada tahun 1997-2000 naik mencapai ± 2,8 juta hektar per tahun.[2] Dalam periode tahun 2000-2009, luas hutan Indonesia yang mengalami deforestasi sebesar 15,6 juta hektar. Pulau Kalimantan menjadi daerah penyumbang deforestasi terbesar yaitu sekitar 36,32 % atau setara dengan 5,50 juta hektar.[3] Indonesia juga memegang rekor dunia untuk emisi gas rumah kaca yang bersumber dari deforestasi, sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serrikat dan Cina.[4] Berbagai penyebab rusaknya hutan Indonesia, diantaranya akibat aktivitas penebangan liar yang terus berlangsung, kebakaran hutan serta industri kehutanan yang tidak ramah lingkungan. Hutan memegang peranan sangat penting dalam siklus karbon dunia, dimana karbon tersimpan dalam jumlah besar dan proses fotosintesa serta respirasi, memperlancar pertukaran karbon dengan atmosfer. Isu kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu elemen terpenting dalam paradigma pembangunan berkelanjutan ketika isu tersebut menjadi perhatian seluruh dunia dalam tahun-tahun terakhir ini.

Momentum Indonesia menjadi tuan rumah UNFCCC ke-13 digunakan untuk melakukan pembahasan isu ini kembali secara komprehensif dengan mengajukan poin *Reducing Emissions for Deforestation in Developing Country* menjadi REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*), degradasi hutan juga dimasukkan. Indonesia, selain sebagai tuan rumah konferensi, memiliki pengaruh dalam kelompok negara berkembang terutama yang tergabung dalam F-12 (*Forestry Twelve*) yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brazil, Peru, Kongo, Kamerun, Sudan, Gabon, Meksiko, Kosta Rika, dan Kolombia. Kondisi ini diharapkan dapat mengambil posisi yang lebih tegas dan berani dalam menekan dan merangkul negara-negara industri maju untuk memiliki satu pendapat dalam penanganan isu perubahan iklim.

Pertemuan KTT perubahan iklim ke-13 terjadi dikotomi antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju enggan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga gaya hidup negara-negara miskin bisa jadi bertahan lebih lama secara ekologis daripada gaya hidup negara-negara maju.[5] Tindak lanjut dari isu REDD kembali dibahas dalam *Conference of the Parties*-14

---

[2] Masripatin Nur.,2010 Hutan Indonesia: *Penyerap dan Penyumbang Emisi Dunia".* Prisma perubahan iklim dan tantangan peradapan, Vol.29 No.2 hal 64

[3] Forest Watch Indonesia,.2011 : *Potret Keadaan Huta Indonesia 2000-2009,*.[e-books] Jakarta tersedia di http://fwi.or.id/ diakses pada tanggal 15 Nopember 2012

[4] Greenpeace Asia, *"Indonesia makes it to 2008 Guinness World Records as fastest forest destroyer on the planet"* tersedia di www.greenpeace.org/ diakses pada tanggal 15 Nopember 2012

[5] Nicholas Low & Brendan Gleeson. 2009. *Politik Hijau Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan.* Nusamedia, Bandung, hal 262

di Poznan, Polandia, tahun 2008 dan berakhir pada *Conference of the Parties-15* di Copenhagen, Denmark, pada Tahun 2009. Pada COP-14 negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok Annex I mulai kehilangan minat untuk menargetkan reduksi emisi karbon global yang telah disepakati dalam *Bali Roadmap*. Konferensi iklim di Kopenhagen tahun 2009 menbahas lebih lanjut gagasan-gagasan para kritikus yang merasa keberlanjutan inisiatif REDD terlalu singkat.[6] Untuk menjawab keraguan dunia, presiden Indonesia pada KTT G20 di Pittsburgh September 2009, menegaskan keinginan Indonesia menjadi bagian dari solusi global, khususnya dalam isu perubahan iklim, diantaranya dengan menurunkan emisi karbon sebesar 26 % atau 41 % dengan bantuan asing melalui mekanisme REDD pada tahun 2020.[7]

Bagi negara berkembang khususnya negara pemilik hutan, tentunya memiliki keuntungan yang besar dari isu lingkungan hidup saat ini, khususnya dari program REDD yang akan memberi *Double Advantages*, yaitu bantuin dana dari negara maju serta pemeliharaan lingkungan khususnya hutan. Munculnya *image* buruk dari kerusakan hutan selama ini menjadi perhatian khusus masyarakat internasional yang menimbulkan kepercayaan dunia untuk memberikan bantuan finansial turun. *Image* buruk tersebut juga tercatat dalam *Guiness Book Of World Records* 2008 sebagai negara dengan kerusakan hutan tercepat didunia, *image* buruk Indonesia juga menjadi pembicaraan NGO seperti *greenpeace* yang lebih meyudutkan posisi Indonesia dimata dunia.

Kerusakan hutan Borneo yang semakin parah membuat Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam kerangka kerja *Heart of Borneo* pada tanggal 12 Februari 2007. Kawasan *Heart of Borneo* mencakup ± 22 juta hektar atau sekitar 30% dari luas pulau, hutan dan lahan saling terhubung secara ekologis di tiga negara pulau Borneo. Luas kawasan *Heart of Borneo* meliputi 57% ada di Indonesia, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara itu 42% berada di Malaysia (di negara bagian Sabah dan Sarawak), sisanya ada di Brunei Darusalam sekitar 1%. Tidak ada batas fisik

---

[6] *Marc Frings,Peran Indonesia dalam kebijakan iklim internasional intensif financial unuk melindungi hutan tersedia di* www.kas.de/wf/doc/kas_22540-1522-20-30.pdf?110616065302 diakses pada tanggal 10 Nofember 2012

[7] *Terbuka Peluang Indonesia Pimpin Gerakan Perubahan Iklim* tersedia di http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/30/222150/89/14/ diakses pada tanggal 10 Noveber 2012

dari cakupan wilayah *Heart of Borneo*.[8] Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui apa saja kepentingan Indonesia dalam kerjasama *Heart of Borneo* dalam penanganan masalah pelestarian hutan di Kalimantan. Untuk mengarahkan penelitian, peneliti menerapkan *Nation-State* (negara-bangsa) sebagai tingkat analisis dan teori kerjasama internasional untuk menganalisis kerjasama ini. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara.

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Viotti dan Kauppi menanbahkan 4 hal yang mendorong dikeluarkannya sebuah kebijakan, berdasarkan pendapat tersebut maka keputusan Indonesia menjalin kerjasama *Heart of Borneo* adalah *Capabilities,* kemampuan Indonesia adalah mempunyai hutan yang sangat luas sehingga, *Interest* kepentingan Indonesia dalam isu perubahan iklim adalah mendapat bantuan finansial melalui mekanisme REDD, *Opportunities* Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar karena Indonesia berhasil mengajukan mekanisme REDD serta aktif dalam isu perubahan iklim sedangkan *Threats* ancaman Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang berujuung bencana alam serta *image* buruk pengelolaan hutan Indonesia akan berdampak terhadap opini global yang meragukan untuk memberikan bantuan finansial .

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional untuk menggambarkan kondisi kerjasama konservasi tersebut. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhanya. Penelitian ini

[8]*Tentang Heart of Borneo* tersedia di http://www.wwf.or.id/upaya_kami/hob/faq/ diakses pada tangal 12 desember 2012

menggunakan konsep kepentingan nasional dalam perspektif politik luar negeri. Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dilihat dari tujuan suatu negara yang berdasarkan kepentingan nasionalnya, hal tersebut selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong yang telah dijelaskan dan dapat dilihat berdasarkan bagan pemikiran dibawah ini:

Bagan 1 : Understanding State Behavior

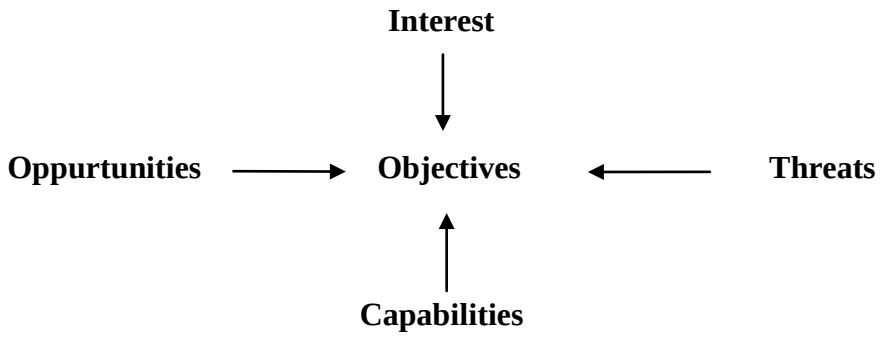

Sumber : Paul R Viotti dan Mark Kauppi. International Relation and World Politics : Security, economy, identity. Prentice Hall. Inc. 1997, hlm 75

Donald E. Nuechterlein mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubunganya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.[9], kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein dibagi menjadi 4 poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar suatu negara, yaitu :[10]

1. *Defense Interest: " The protection in the nation state and citizen from the threat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired*

[9] Donald E. Nucterlain. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57.
[10] *Ibid*,. Hal. 57-75

threat to national political system". Kepentingan pertahanan yaitu perlindungan terhadap negara-bangsa serta warga negara dari ancaman kekerasan fisik negara lain dan atau hal lain yang mengancam sistem politik nasional.

2. *Economic Interest: " Enchancement of national interest economic well-being in relation with other countries".* Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.

3. *World Order Interest: " The maintenance of an international politic and economy system in with us citizen and operate pescefully outside their own worders".* Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.

4. *Ideological Interest: " The protection and furtherance of set values with the citizen of a nation sate and believe to be universality good".* Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai yang dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Berdasarkan konsep kepentingan yang dikemukakan Neuchterlein diatas, *Economy Interest* dan *World Order Interest* menjadi perhatian penulis dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksplanatif yang berupaya menjelaskan kepentingan Indonesia menjalin kerjasama *Heart of Borneo* dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini konsisten dengan *qualitative paradigm*. John W. Craswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai

"…*an inguiry process of understanding a social or Human Problem based on building a complex holistic picture, formed with word, reporting detailed views of informant and conducted in natural setting*". [11]

Penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman suatu permasalahan sosial yang bersifat eksplanatif. Dalam meneksplorasi fenomena sosial tersebut peneliti mulai dari premis-premis yang bersifat khusus menuju sebuah generalisasi (proses induktif).Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari sumber-sumber yakni berupa literatur-literatur (buku-buku), terbitan berkala seperti surat kabar, majalah, artikel-artikel dari berbagai jurnal ilmiah baik berasal dari internet yang mendukung pengumpulan data maupun data sekunder dengan berbagai permasalahan yang dibahas.

Kepentingan Indonesia Dalam Kerjasama *Heart of Borneo*

Kebijakan luar negeri suatu negara adalah cermin dari kondisi di dalam negeri negara tersebut. Kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup seringkali bukan dilandasi kepentingan terhadap isu lingkungan hidup semata, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain yang mendorong proses formulasi kebijakan luar negeri tersebut. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Presiden Clinton dari Partai Demokrat menandatangani Protokol Kyoto, namun ketika George Walker Bush yang menjadi Presiden, maka Protokol yang sudah ditandatangani tersebut, dimentahkan lagi. Keadaan ini disebabkan oleh besarnya kepentingan para pengusaha AS yang memandang bahwa jika Protokol Kyoto diratifikasi, maka kelangsungan pertumbuhan ekonomi AS akan menjadi terbatas.

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu akibat dari pembangunan yang tidak terkendali sehingga kebanyakan kasus kerusakan lingkungan sangat sulit atau bahkan sama sekali tidak dapat diperbaiki kembali ke kondisi semula (*irreversibility*). Karena itu perlunya ketegasan dari pemerintah agar ada suatu sistem kebijakan dan mekanisme yang lebih mengutamakan keselamatan lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Persoalan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kelestarian lingkungan hidup, terutama terkait dengan tingginya laju kerusakan hutan (*deforestasi*). Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia kini secara cepat mulai kehilangan hutan yang juga menjadi paru-paru dunia. Menghadapi masalah *deforestasi*

[11] John W. Craawell, "Designing Qualitative Reasearch", London : Sage Publication, 1995, hal 10

disaat Indonesia menempati posisi strategis dalam negosiasi perubahan iklim dunia dinilai merugikan jika tidak segera diatasi. Salah satu kebijakan Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menjalin kerja sama lintas batas *Heart of Borneo*. Deklarasi *Heart of Borneo* ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, *Minister of Natural Resources and Environment* -Malaysia, dan *Minister of Industry and Primary Resources*–Brunei Darussalam di Bali, pada tanggal 12 Februari 2007.

Kebijakan Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Brunei dalam kerangka kerja *Heart of Borneo* tidak terlepas dari kepentingan nasional yang diperjuangkan Indonesia. Menurut K.J Holsti, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama, salah satunya adalah karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Kerusakan hutan Borneo yang terletak pada 3 negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei) sangat mengkhawatirkan. Saat ini hutan Borneo yang tersisa tidak lebih dari 60%, dan apabila praktik-praktik pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab ini terus berlangsung maka keberadaan hutan akan terus berkurang. Akibatnya akan menurunkan fungsi hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan timbulnya bencana alam.[12] Ancaman atas kerusakan hutan Borneo (Hutan Kalimantan, hutan Malaysia dan Hutan Brunei) menjadi dasar kebijakan Indonesia untuk memutuskan menjalin kerjasama *Heart of Borneo.* Dalam kerjasama *Heart of Borneo* pasti terdapat *Maker motivations* atau motif yang menyebabkan terjadinya kepentingan Indonesia tersebut.

Berdasarkan 4 jenis kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein, maka penulis menekankan kepada *World Order Interest* dan *Economic Interest* dalam menganalisis motivasi Indonesia dalam kerjasama *Heart of Borneo.* Terjadinya kerusakan hutan besar-besaran yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi telah meruntuhkan citra Indonesia dimata dunia. Menurunnya kepercayaan masyarakat internasional disebabkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola hutan alam tropis yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu paru-paru dunia dinilai gagal. Saat ini Indonesia menjadi pusat perhatian dunia karena tingkat kerusakan hutan yang semakin parah, terbukti pada tahun 2008, Indonesia tercatat dalam *Guiness Book Of World Records* untuk kerusakan hutan tercepat didunia. Pencapaian ini bukan sebuah

[12] *"Booklet Heart of Borneo"* tersedia di http://www.wwf.or.id/?23581/Booklet-Heart-of-Borneo diakses pada tanggal 10 Maret 2013

prestasi melainkan sebuah ancaman yang akan mempengaruhi upaya negosiasi Indonesia dalam forum perubahan iklim dunia.

Tekanan dari NGO juga membuat posisi Indonesia menjadi sulit dalam negosiasi perubahan iklim, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut organisasi internasional berupaya menghalangi Indonesia untuk memanfaatkan potensi hutan.[13] seperti Greenpeace yang aktif memberitakan isu kerusakan hutan Indonesia akibat industri sawit dan kertas yang tidak ramah lingkungan. Menyadari hal tersebut Indonesia berinisiatif untuk menjalin kerjasama *Heart of Borneo* sebagai upaya memperbaiki *image* buruk yang menyudutkan Indonesia dimata dunia, *image* ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat internasional untuk memberikan bantuan pendanaan melalui skema CDM serta menghambat negosiasi Indonesia untuk menjadikan mekenisme REDD sebagai pengganti Protokol Kyoto nantinya.

Keputusan Indonesia untuk menjalin kerjasama *Heart of Borneo* tidak terlepas dari kepentingan ekonomi atau *Economic Interest.* Peluang Indonesia menguasai pasar perdagangan karbon dunia terbuka lebar karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan Hutan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh APHI, tahun 2009 potensi karbon yang terserap dan tersimpan di hutan Indonesia mencapai 25,773 milyar ton belum termasuk yang tersimpan di dalam lahan hutan (gambut dan lahan kering).[14] Peluang perdagangan karbon di Indonesia besar dengan perhitungan potensi karbon yang terserap di hutan Indonesia capai 25,77 miliar ton. Indonesia menduduki urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan 10% suplai carbon credit dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar US$105 miliar hingga US$114 miliar.[15]

Melihat potensi hutan yang dimiliki, Indonesia menyadari mempunyai andil besar dalam mengurangi emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi, sehingga muncul kepentingan besar Indonesia yang tertuang dalam strategi politik luar negeri Indonesia yang memperjuangkan REDD dalam perundingan internasional untuk memperoleh keuntungan finansial dan transfer

---

[13] " *Yudhoyono tuding LSM asing halangi pemanfaatan hutan"* tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

[14] *"Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Karbon"* tersedia di http://www.tribunnews.com/2011/08/10/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

[15] *"Potensi perdagangan karbon Indonesia capai 25,77 miliar ton"* tersedia di http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/75877 diakses pada tanggal 7 Maret 2013

teknologi dari negara maju.[16] Inisiatif *Heart of Borneo* sangat berhubungan dengan konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian yang adil dari komponen-komponen keanekaragaman hayati). Inisiatif *Heart of Borneo* juga relevan dan terkait dengan kerangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reduction of Emission from Deforestation and Degradation / REDD*).[17] Dengan konservasi dan pembeangunan berkelanjutan di wilayah *Heart of Borneo* Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keuntungan yang didapat melalui mekanisme perdagangan karbon yang tercakup dalam mekanisme REDD serta bantuan asing.

Bantuan Asing Dalam Program *Heart of Borneo*

Dalam event *Government Negotiation* di Bonn, Jerman pada tanggal 1-2 Oktober 2007. Indonesia mendapatkan bantuan kerjasama baru dalam bidang Perubahan Iklim. . Pendanaan Kehutanan sejumlah 26 juta Euro tersebut terbagi dalam skema kerjasama keuangan (*Financial Cooperation* / FC) dan kerjasama bantuan teknik (*Technical Cooperation* / TC). Pada tahun 2009, program FORCLIME membantu pemerintah Indonesia dalam proyek konservasi *Heart of Borneo.* Menurut informasi dari pihak pengelola program FORCLIME, kemitraan ini mulai berjalan dari 2009 hingga 2020. Biaya seluruhnya diperkirakan mencapai sekitar 70 - 80 juta euro.

Melalui *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* Indonesia dan Australia menjalin kemitraan sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui penerapan REDD di Indonesia. *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* (IAFCP) disepakati antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada 13 Juni 2008 dengan nilai $ 40 juta.[18] *Kalimantan Forest Carbon Partnership* (KFCP) adalah salah satu kegiatan percontohan (*Demonstration activity* / DA) di bawah kemitraan *Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership* / IAFCP, wilayah kerja KFCP seluas 120.000 hektar yang merupakan bagian dari sekitar 1,4 juta hektar eks-areal pengembangan lahan gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas,

---

[16] Runi Nurhayati dalam *" Mekanisme REDD sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC Ke-13* " tersedia di http://journal.unair.ac.id/filerPDF/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

[17] *"Siaran Pers Nomor: S.500/II/PIK-1/2007"* tersedia di http://www1.dephut.go.id/index.php/news/details/1691 diakses pada tanggal 11 Maret 2013

[18] *"Action under the International Forest Carbon Initiative*" tersedia di http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/ diakses pada tanggal 12 Maret 2013

Propinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama Indonesia dan Australia dalam mengatasi kerusakan hutan di Kalimantan akan berdampak positif terhadap keberhasilan program *Heart of Borneo,* sebab Australia selain memberikan bantuan finansial melalui mekanisme REDD, pemerintah Australia juga memberikan dukungan teknis dalam memantau dan mengukur potensi karbon di hutan Indonesia dengan membentuk *Indonesia's Natinal Carbon Accounting System (INCAS)* dan *Forest Resource Information System (FRIS).* Hal ini dikaitkan dengan sistem perhitungan karbon di Australia NCAS *(National Carbon Accounting System).*

Pada 2012 Dewan Global Environment Facility (GEF) menyetujui 9 juta US$ atau sekitar 86 milyar rupiah untuk Program *Heart of Borneo. Global Environment Facility* (GEF) adalah mekanisme keuangan yang memberikan hibah dan dana kepada negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi untuk proyek-proyek dan aktivitas yang bertujuan melindungi lingkungan global

Lewat program *Heart of Borneo, Asian Development Bank* mengucurkan dana sebesar 4,5 juta dollar untuk membantu upaya konservasi hutan Kalimantan pada 2013. Dana ini dialokasikan sebagai bentuk dukugan untuk memperkuat pembuatan kebijakan dan institusi untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan keragaman hayati yang berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas badan-badan pemerintah untuk mengembangkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.[19]

Kesimpulan

Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas. Dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Perhatian dunia sedang terarah ke Indonesia. Selain menjadi tuan rumah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP) ke-13 di Bali pada Desember 2007, Indonesia meraih rekor baru penyumbang nomor satu emisi karbon dioksida dari sektor kehutanan menurut *Guiness Book Of World Records*.

[19] *"ADB Bantu Pelestarian Hutan US$ 4,5 Juta"* tersedia di http://www.indonesiafinancetoday.com/ diakses pada tanggal 12 Maret 2013

Pertemuan Para Pihak (COP) ke-13 tersebut menghasilkan Rencana Aksi Bali (*Bali Action Plan*), sebuah rencana atau peta jalan negosiasi strategi iklim global untuk melanjutkan Protokol Kyoto. Munculnya *image* buruk dari kerusakan hutan selama ini menjadi perhatian khusus masyarakat internasional yang menimbulkan kepercayaan dunia untuk memberikan bantuan finansial turun. *Image* buruk tersebut juga tercatat dalam *Guiness Book Of World Records* 2008 sebagai negara dengan kerusakan hutan tercepat didunia, *image* buruk Indonesia juga menjadi pembicaraan NGO seperti *greenpeace* yang lebih meyudutkan posisi Indonesia dimata dunia. Salah satu upaya Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional pada isu perubahan iklim adalah deklarasi *Heart of Borneo* yang melibatkan Malaysia dan Brunei Darussalam.

Kepentingan Indonesia menjalin kerjasama dengan Malaysia dan Brunei dalam kerangka kerja *Heart of Borneo* adalah *World Order Interest* dan *Economic Interest.* Terjadinya kerusakan hutan besar-besaran yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi telah meruntuhkan citra Indonesia dimata dunia internasional, munculnya *image* buruk pengelolaan hutan Indonesia akan berdampak kepada menurunya minat negara maju untuk memberikan bantuan finansial kepada Indonesia. Keputusan Indonesia untuk menjalin kerjasama *Heart of Borneo* tidak terlepas dari kepentingan ekonomi atau *Economic Interest.* Peluang Indonesia menguasai pasar perdagangan karbon dunia terbuka lebar karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan kawasan Hutan.). Inisiatif *Heart of Borneo* juga relevan dan terkait dengan kerangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (*Reduction of Emission from Deforestation and Degradation / REDD.* Dengan konservasi dan pembeangunan berkelanjutan di wilayah *Heart of Borneo* Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keuntungan yang didapat melalui mekanisme perdagangan karbon yang tercakup dalam mekanisme REDD serta bantuan asing. Dengan mekanisme REDD kerjasama *Heart of Borneo* mendapat bantuan dari Australia, Norwegia , Jerman, *Asian Development Bank* dan *Global Environment Facility*.

DAFTAR PUSTAKA

Donald E. Nucterlain. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57.

John W. Craawell, "Designing Qualitative Reasearch", London : Sage Publication, 1995, hal 10

Masripatin Nur.,2010 Hutan Indonesia: *Penyerap dan Penyumbang Emisi Dunia".* Prisma perubahan iklim dan tantangan peradapan, Vol.29 No.2 hal 64

" *Yudhoyono tuding LSM asing halangi pemanfaatan hutan"* tersedia di http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

"Action under the International Forest Carbon Initiative" tersedia di http://www.climatechange.gov.au/government/initiatives/ diakses pada tanggal 12 Maret 2013

"ADB Bantu Pelestarian Hutan US$ 4,5 Juta" tersedia di http://www.indonesiafinancetoday.com/ diakses pada tanggal 12 Maret 2013

"Booklet Heart of Borneo" tersedia di http://www.wwf.or.id/?23581/Booklet-Heart-of-Borneo diakses pada tanggal 10 Maret 2013

"Indonesia Berpeluang Kuasai Pasar Karbon" tersedia di http://www.tribunnews.com/2011/08/10/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

"Potensi perdagangan karbon Indonesia capai 25,77 miliar ton" tersedia di http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/75877 diakses pada tanggal 7 Maret 2013

"Siaran Pers Nomor: S.500/II/PIK-1/2007" tersedia di http://www1.dephut.go.id/index.php/news/details/1691 diakses pada tanggal 11 Maret 2013

Forest Watch Indonesia,.2011 : *Potret Keadaan Huta Indonesia 2000-2009,*.[e-books] Jakarta tersedia di http://fwi.or.id/ diakses pada tanggal 15 Nopember 2012

Greenpeace Asia, *"Indonesia makes it to 2008 Guinness World Records as fastest forest destroyer on the planet"* tersedia di www.greenpeace.org/ diakses pada tanggal 15 Nopember 2012

Marc Frings,Peran Indonesia dalam kebijakan iklim internasional intensif financial unuk melindungi hutan tersedia di www.kas.de/wf/doc/kas_22540-1522-20-30.pdf?110616065302 diakses pada tanggal 10 Nofember 2012

Nicholas Low & Brendan Gleeson. 2009. *Politik Hijau Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan.* Nusamedia, Bandung, hal 262

Runi Nurhayati dalam *" Mekanisme REDD sebagai Isu Penting Indonesia pada UNFCCC Ke-13* " tersedia di http://journal.unair.ac.id/filerPDF/ diakses pada tanggal 10 Maret 2013

Terbuka Peluang Indonesia Pimpin Gerakan Perubahan Iklim tersedia di http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/30/222150/89/14/ diakses pada tanggal 10 Noveber 2012